

Planning Paper
Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan
Daerah Istimewa Yogyakarta
2012-2017

Pendahuluan

Penyusunan *planning paper* ini ditujukan untuk menerjemahkan dan memperjelas orientasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pembangunan jangka menengah sebagaimana teruraikan pada dokumen RPJM DIY Tahun 2012-2017. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah penyiapan rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan. Dengan semakin jelasnya orientasi dan target pembangunan lima tahun ke depan maka Biro Administrasi Pembangunan dapat memberikan kontribusi yang optimal dan terarah melalui penyiapan program dan kegiatan yang lebih relevan, strategis, dan sistematis.

Paper ini diawali dengan mereview mandat yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan di DIY. Bagian berikutnya merupakan paparan review terhadap isu strategis, yaitu permasalahan yang berpengaruh bagi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan mandat. Setelah isu strategis terdefiniskan maka berikutnya adalah perumusan strategi untuk merespons isu strategis diikuti perumusan program prioritas dan tahapan penyelenggaraannya selama lima tahun. Paper ini disusun dalam jumlah halaman yang seminimal mungkin mengingat fungsinya sebagai alat bantu dalam penyusunan dokumen rencana strategis yang lebih lengkap dan operasional.

Mandat

Mandat yang dimaksudkan di sini adalah tanggungjawab atau amanah yang diberikan oleh Pemerintah DIY. Mandat untuk Biro Administrasi Pembangunan dapat diidentifikasi dari empat hal penting, yaitu rumusan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi mandat diperlukan untuk

memantapkan peran dan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan DIY.

Biro Administrasi Pembangunan mendapatkan amanah yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Amanah yang diemban yaitu sebagai institusi yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral, kebudayaan dan pariwisata, dekonsentrasi dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Tupoksi ini menunjukkan Biro Administrasi Pembangunan memiliki peran sentral dalam mengawal proses kebijakan mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi. *Strategic value* dari bidang kebijakan yang diampunya juga sangat tinggi karena berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Ini mengukuhkan Biro Administrasi Pembangunan sebagai salah satu *think tank* pembangunan DIY.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan harus dimaknai secara lebih luas. Bahan perumusan kebijakan tidak harus selalu berupa rancangan peraturan daerah atau peraturan gubernur. Bahan perumusan kebijakan dapat berupa hasil kajian sistematis tentang isu strategis tertentu, seperti peta permasalahan tertentu dan sumber-sumber atau penyebabnya. Peta permasalahan dan sumber atau penyebabnya ini dapat disebut sebagai bahan perumusan kebijakan karena ini merupakan referensi penting bagi SKPD teknis dalam mengembangkan program dan kegiatannya. Pengembangan program dan kegiatan oleh SKPD teknis harus berbasis data dan informasi yang aktual dan terpercaya, yang dapat diproduksi melalui kajian sistematis yang dilakukan atau difasilitasi oleh Biro.

Karena Biro Administrasi Pembangunan juga memiliki tupoksi untuk mengkoordinasi implementasi kebijakan maka Biro Administrasi Pembangunan sebaiknya mengembangkan program yang mampu memproduksi bahan yang lebih matang untuk perumusan kebijakan, yaitu berupa *policy paper* yang berisi analisis permasalahan dan rekomendasi kebijakan atau bahkan berupa rancangan kebijakan yang matang dan siap direview untuk dijadikan sebagai pilihan kebijakan yang akan diimplementasikan. Kebijakan di sini dapat berupa rencana aksi untuk merespon atau mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu ataupun *grand design* dan *road map* pengembangan kebijakan tertentu.

Pemerintah DIY saat ini sedang menjalankan agenda pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DIY 2012-2017. Dokumen RPJM DIY ini menjadi referensi utama bagi Biro Administrasi Pembangunan dalam menyusun rencana strategis (Renstra) lima tahunan. Terdapat setidaknya tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari RPJM DIY 2012-2017, yaitu visi dan misi pembangunan daerah, isu strategis yang relevan, serta sasaran dan strategi pembangunan yang berkaitan. Program prioritas sebenarnya merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahkan dirujuk dan diadopsi. Namun sayangnya bagian ini pada RPJM DIY masih terlalu abstrak dan makro. Memperhatikan kondisi ini maka paper rencana strategis ini lebih merupakan pengejawantahan dari rumusan visi dan misi pembangunan, respons terhadap isu strategis yang relevan, serta operasionalisasi strategi Biro Administrasi Pembangunan dalam berkontribusi mencapai sasaran tertentu yang berkaitan dengan tupoksi.

Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah DIY 2012-2017 menegaskan peran penting Biro Administrasi Pembangunan. Untuk mewujudkan “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”, Biro Administrasi Pembangunan harus menjadi panglima penyelenggaraan pembangunan terutama dalam mengawal pencapaian DIY yang lebih “berkarakter, “berbudaya”, dan “maju” pada 2017.

Salah satu bidang kebijakan yang diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan adalah bidang kebudayaan (dan pariwisata). Dengan demikian Biro Administrasi Pembangunan bertanggungjawab atas upaya Pemerintah DIY mewujudkan DIY yang lebih berkarakter dan berbudaya. Sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJM (hlm.V-5), DIY yang lebih berkarakter dimaknai sebagai “kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat”. Sedangkan DIY yang lebih berbudaya, sebagaimana disebutkan dalam RPJM di halaman yang sama, dimaknai sebagai “kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius)”. Menyadari peran Biro Administrasi Pembangunan sebagai penyedia bahan perumusan kebijakan, koordinator

dan evaluator kebijakan di bidang kebudayaan maka konsekuensinya adalah Biro Administrasi Pembangunan menjadi panglima dalam mewujudkan kedua *value* dari Visi Pembangunan jangka menengah DIY tersebut.

Biro Administrasi Pembangunan juga berperan penting dalam mendukung upaya mewujudkan DIY “yang maju”. Disebutkan juga dalam RPJM (hlm.V-5), DIY yang maju dimaknai sebagai “masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya **yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi**”. Selain itu, masyarakat yang maju juga ditandai oleh **kehidupan masyarakat yang didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai**. Ini artinya Biro Administrasi Pembangunan harus mengawal pengembangan infrastruktur yang menjadi prasyarat penting terwujudnya “DIY yang Maju”, mengingat pekerjaan umum adalah bidang kebijakan lainnya yang diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan.

Rumusan misi pembangunan DIY 2012-2017 juga memberikan ketegasan mengenai peran dan kontribusi penting yang diharapkan dari Biro Administrasi Pembangunan. Dari empat rumusan misi, dua di antaranya terkait dengan apa yang menjadi tanggungjawab Biro Administrasi Pembangunan, yaitu Misi Pertama dan Keempat.

Misi Pertama: *“Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya”.*

Misi Keempat: *“Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang”.*

Pemerintah DIY juga telah menetapkan sasaran untuk setiap Misi tersebut. Penyelenggaraan Misi Pertama memiliki empat sasaran untuk dicapai selama lima tahun ke depan, yaitu: **(1) Meningkatnya kualitas SDM**, **(2) Menurunnya persentase penduduk miskin**, **(3) Menurunnya pengangguran terbuka**, serta **(4) meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya**. Sedangkan untuk penyelenggaraan Misi Keempat terdapat tiga sasaran, yaitu: **(1) Terwujudnya ketersediaan**

infrastruktur yang memadai baik kuantitas maupun kualitas yang mengacu kesesuaian tata ruang, (2) Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik, dan (3) Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan

Dengan demikian Biro Administrasi Pembangunan mendapatkan mandat yang sangat luar biasa besar. Ini bukan berarti Biro Administrasi Pembangunan diharapkan mendominasi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus dimaknai sebagai harapan besar terhadap Biro Administrasi Pembangunan untuk menjadi salah satu aktor penting dan strategis dalam pembangunan di DIY. Kegagalan Biro Administrasi Pembangunan dalam memahami dan menjalankan peran sesuai dengan mandat yang diberikan dapat menyebabkan kegagalan pencapaian visi pembangunan DIY pada 2017. Untuk meningkatkan akuntabilitas (pertanggungjawaban pada publik) dan responsibilitas (pertanggungjawaban terhadap institusi dan pimpinan Pemerintah DIY) maka Biro Administrasi Pembangunan perlu mempersiapkan strategi untuk memenuhi mandat tersebut. Dalam menentukan strategi, Biro Administrasi Pembangunan harus memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga mandat dapat dipenuhi secara efektif.

Isu Strategis

Pada dokumen RPJM DIY 2012-2017 telah dipaparkan banyak isu pembangunan, yang pada dokumen tersebut disebut sebagai isu strategis. Sayangnya, paparan isu pembangunan di RPJM DIY hanya sebatas rumusan pernyataan tanpa ada dukungan data atau setidaknya penjelasan yang memadai sehingga tidak diketahui kondisi faktual dan aktual dari setiap isu yang disebutkan. Meskipun demikian, identifikasi isu strategis pada paper ini tetap didasarkan pada rumusan isu pembangunan dari RPJM DIY (Tabel 1). Bidang isu yang dipilih adalah yang relevan dengan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan, yaitu yang terkait dengan bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral, serta kebudayaan dan pariwisata. Namun dari daftar isu pembangunan tersebut diseleksi untuk mendapatkan satu isu strategis, yaitu isu pembangunan yang apabila direspon dengan baik akan berdampak positif terhadap penyelesaian banyak isu pembangunan lainnya, dan sebaliknya apabila tidak direspon akan berdampak negatif.

**Tabel 1. Daftar dan Kategori Isu Pembangunan pada RPJM DIY 2013-2017
yang Relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan**

No	Bidang	Isu Strategis
1	Keciptakarya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pengembangan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dengan memperhatikan tata ruang. 2) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. 3) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan. 4) Perlunya Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan. 5) Perlunya penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya. 6) Diperlukannya keandalan bangunan gedung Negara. 7) Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta. 8) Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.
2	Energi Dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui upaya penciptaan energi baru yang diperbarukan, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga biogas belum maksimal. 2) Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi belum berjalan efektif. 3) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal. 4) Kurangnya pemenuhan kebutuhan energi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 5) Masih rendahnya pangsa energi baru dan diperbarukan. 6) Konservasi energi sebagai upaya penurunan elastisitas energi. 7) Belum optimal dan terpadunya pengelolaan air tanah. 8) Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan
3	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal. 2) Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam kepunahannya. 3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional. 4) Perlunya perhatian khusus dan kaderisasi sejak dini di bidang kebudayaan agar tidak stagnan, karena generasi sekarang akan lebih

		<p>mudah menyerap kebudayaan asing dari pada kebudayaannya sendiri. Secara khusus pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung.</p> <p>5) Sarana dan prasarana museum yang lengkap secara teknis serta dukungan manajemen yang memadai belum seperti yang diharapkan.</p>
4	Pariwisata	<p>1) Daya dukung dan daya saing pariwisata belum kuat dan memadai.</p> <p>2) Suasana kondusif akibat dari isu politik, keamanan dan kesehatan belum tercipta secara penuh.</p> <p>3) Inovasi jenis jenis wisata berbasis budaya pengembangan produk dan penambahan destinasi pariwisata belum optimal.</p> <p>4) Lama tinggal wisatawan belum mengalami peningkatan yang signifikan.</p> <p>5) Kualitas pelayanan wisata belum optimal.</p> <p>6) Pemasaran pariwisata yang dilakukan pemerintah dan swasta masih kurang terintegrasi.</p> <p>7) Kemitraan usaha pariwisata masih perlu ditingkatkan lagi.</p> <p>8) Peningkatan dan penyediaan SDM pariwisata yang memiliki daya saing masih sangat minim.</p> <p>9) Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah.</p>
5	Transportasi	<p>1) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah perlu ditata ulang.</p> <p>2) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk (moda transportasi mass rapid transportation) dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal.</p> <p>3) Jaringan pelayanan transportasi perkotaan dengan menitikberatkan pada manajemen lalu lintas dan penggunaan angkutan umum masih perlu dikembangkan.</p> <p>4) Pelayanan transportasi darat yang menghubungkan pusat-pusat bangkitan dengan layanan jasa, dan pendidikan perlu ditingkatkan.</p> <p>5) Pelayanan bandar udara bertaraf internasional perlu dikembangkan.</p> <p>6) Perlunya peningkatan pengendalian lalu lintas jalan di perkotaan sebagai upaya pengurangan polusi udara.</p>
6	Sumber Daya Air	<p>1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).</p> <p>2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta sarana pendukung lainnya.</p> <p>3) Belum optimalnya penyediaan, dan pemanfaatan sumberdaya air.</p> <p>4) Masih diperlukannya penguatan kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan.</p> <p>5) Masih tingginya konflik pemanfaatan sumberdaya air;</p> <p>6) Pertumbuhan penduduk memerlukan peningkatan penyediaan sumber air baku.</p> <p>7) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan.</p>

		<p>8) Konversi lahan menjadi lahan terbangun harus diimbangi dengan konservasi sumberdaya air untuk mempertahankan ketersediaan air.</p> <p>9) Perencanaan sumberdaya air terpadu didukung pengembangan sistem informasi sumberdaya air perlu dikembangkan.</p> <p>10) Usaha pemanfaatan air memerlukan pengembangan sumber energi mikro, budidaya perikanan, maupun untuk tujuan wisata.</p>
7	Tata Ruang	<p>1) Belum konsistensinya pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>2) Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah.</p> <p>3) Perlunya Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial dan memiliki peluang pertumbuhan ekonomi tinggi.</p> <p>4) Tekanan kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya pada kawasan lindung (perubahan fungsi lahan) yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan bencana.</p> <p>5) Pola pemanfaatan ruang yang tidak teratur khususnya pada wilayah perkotaan.</p> <p>6) Pengendalian perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan, sehingga perlu perencanaan yang matang dan dikembangkan sesuai dengan daya dukung.</p> <p>7) Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan.</p> <p>8) Diperlukannya penetapan kerangka umum kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten sebagai implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY.</p> <p>9) Perlunya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten.</p> <p>10) Mewujudkan nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.</p>
8	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi	<p>1) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik.</p> <p>2) Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan penelitian baik ilmu dasar maupun terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal.</p> <p>3) Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian antara stakeholders agar berkelanjutan masih kurang.</p> <p>4) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat perdesaan masih kurang.</p> <p>5) Penanggulangan kejahatan teknologi informasi (<i>cyber crime</i>) masih lemah.</p>

Sumber: RPJM DIY 2013-2017, diolah oleh penulis

Dengan menggunakan kriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya maka isu pembangunan yang benar-benar bersifat strategis bagi Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

Kebudayaan

Isu strategis: Perlunya perhatian khusus dan kaderisasi sejak dini di bidang kebudayaan.

Generasi muda mempunyai peran penting dalam mata rantai penjagaan nilai kebudayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan institusi pendidikan sebagai institusi yang bukan hanya mengenalkan dan melestarikan berbagai atraksi kesenian dan budaya, tetapi lebih penting dari itu adalah membentuk karakter yang adiluhung. Sekolah sekarang ini bahkan telah bergeser menjadi institusi yang seolah hanya memiliki misi untuk melakukan *transfer of knowledge* dan kurang memperhatikan pembentukan skill, terutama soft skill, dan apalagi karakter. Aspek knowledge-pun akhirnya hanya sebatas kepuasan terhadap ukuran yang dangkal, yaitu skor atau nilai ujian. Kondisi penyelenggaraan pendidikan seperti ini harus diwaspadai karena berpotensi menghasilkan masyarakat yang tidak memiliki karakter. Penanaman kepedulian terhadap nilai-nilai luhur budaya, adat, kesenian, bahasa serta kearifan budaya lokal melalui institusi pendidikan juga perlu dikaji efektivitasnya sejak kita mengetahui orientasi institusi dan penyelenggaraan pendidikan telah mengalami pergeseran.

Pariwisata

Isu strategis: Kemitraan usaha pariwisata masih perlu ditingkatkan.

Kemitraan dalam pengembangan usaha pariwisata menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. DIY sebagai salah satu daerah tujuan wisata dengan potensi pariwisata yang luar biasa tidak dapat berkembang secara optimal tanpa sebuah langkah kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha wisata dan masyarakat. Kemitraan antar aktor tersebut bukan hanya dapat mengantisipasi *government failure*, *market failure*, dan *voluntary failure*, tetapi juga mengoptimalkan kemanfaatan dari pengembangan pariwisata. Kemitraan di sini mencakup penyediaan dan pengembangan SDM, ekstensifikasi destinasi dan produk wisata, manajemen pelayanan, pemasaran, serta penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan pariwisata. Semua itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata di

DIY. Konsep “Yogyakarta menghadap Selatan” juga harus dimanifestasikan melalui rekonseptualisasi pengemasan dan pengembangan paket wisata yang terintegrasi di DIY.

Transportasi

Isu strategis: Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah perlu ditata ulang.

Ketersediaan sistem jaringan dan sarana transportasi yang terpadu antarmoda dan antarwilayah serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi menjadi kebutuhan masyarakat dan pembangunan DIY. Lebih dari itu, angkutan umum yang efisien, yaitu yang memiliki kapasitas angkut massal, cepat, dan terjangkau, juga semakin diperlukan. Angkutan umum massal berbasis rel paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan itu karena selain untuk mengantisipasi semakin padatnya lalu lintas di jalan raya juga dapat mengefisienkan pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat dan pelaku usaha. Sarana transportasi ini juga patut dipertimbangkan dalam menyediakan akses masyarakat ke lokasi bandara yang baru nantinya. Penyediaan akses berupa penambahan jalan baru atau bahkan jalan tol cenderung menciptakan insentif bagi masyarakat untuk semakin meninggalkan angkutan umum dan lebih memilih kendaraan pribadi yang berarti meningkatkan potensi kemacetan dan berbagai masalah transportasi lainnya.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

Isu strategis: Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik.

Sebagai daerah yang memiliki banyak institusi pendidikan yang unggul, hasil riset seharusnya menjadi bahan strategis dalam perumusan kebijakan. Saat ini masing-masing institusi, yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan, sibuk dengan dunia masing-masing dan saling terasing. Kerjasama di antara kedua lembaga ini cenderung bersifat kontraktual sehingga justru melonggarkan ikatan emosional. Kerjasama juga lebih dimaknai proyek administratif sesaat, bukan sebuah agenda bersama dan berbagi sumberdaya untuk mendorong perubahan tata pemerintahan, kultur dan kinerja secara signifikan dan lebih baik. Sejumlah perguruan tinggi ternama di DIY saat ini telah memiliki mitra dari perguruan tinggi luar negeri dan lembaga internasional untuk meningkatnya produktivitas penelitian dan pengembangan. Mereka kini membutuhkan arena untuk pengembangan penelitian dan aktualisasi ilmu pengetahuan. DIY

sendiri memiliki kebutuhan untuk pengawalan reformasi birokrasi dan pengembangan masyarakatnya. Kedua arus kebutuhan ini semestinya dapat dipertemukan sehingga kerjasama antara institusi pendidikan dan pemerintah di DIY akan lebih fungsional, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi prakondisi bagi pengembangan *evidence-based policy*, yaitu kebijakan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditargetkan untuk menghasilkan output dan outcome yang jelas dan terukur.

Tata Ruang

Isu strategis: Belum konsistennya pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

DIY dan kelima kabupaten/ kota di dalamnya telah memiliki RTRW yang telah memetakan fungsi kawasan dengan cukup komprehensif, termasuk kawasan strategis untuk kegiatan ekonomi produktif, permukiman, fasilitas sosial ekonomi, konservasi, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya banyak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Dampak dari praktik semacam ini begitu luas, seperti semakin padatnya wilayah tertentu, merosotnya daya dukung lingkungan, kepadatan lalu lintas, produksi pangan semakin berkurang (karena sawah dan lahan produksi tanaman pangan terus berkurang), dan sebagainya. Rencana tata ruang, termasuk tanah kasultanan dan kadipaten, yang komprehensif dan pelaksanaannya secara konsisten diperlukan untuk mengoptimalkan daya dukung ruang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan DIY.

Keciptakarya

Isu strategis: Kurangnya pengembangan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dengan memperhatikan tata ruang.

Perencanaan yang matang dalam pengembangan permukiman pada pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai RTRW perlu dilakukan. Apabila perencanaan tersebut tidak dilakukan secara matang dan diikuti monitoring yang ketat maka konsentrasi penduduk di wilayah tertentu dan juga munculnya *sprawl*, yaitu luapan permukiman di daerah pinggiran kota yang kondisinya tidak teratur, akan menimbulkan permasalahan baru yang terkait transportasi, kesehatan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Energi dan Sumberdaya Mineral

Isu strategis: Pemenuhan kebutuhan energi melalui upaya penciptaan energi baru yang terbarukan serta penghematan energi belum optimal.

Sumber energi baru yang terbarukan memungkinkan untuk dikembangkan. Eksplorasi dan pengembangan sumber energi baru melalui kerjasama penelitian dan pengembangan inovasi dengan berbagai pihak perlu dilakukan. Temuan inovatif dari upaya ini dapat mempromosikan penghematan sumberdaya dan keramahan terhadap lingkungan. Pengembangan inovasi yang dapat diaplikasikan di perkantoran, permukiman ataupun sarana transportasi juga dapat memperkuat daya tarik DIY sebagai sumber inovasi dan wisata edukasi. Selain itu, praktik pemborosan energi, terutama di lingkungan perkantoran dan fasilitas publik, juga perlu dieksplorasi dan dipetakan. Audit penggunaan energi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong gerakan penghematan energi di DIY, setidaknya di perkantoran dan fasilitas publik.

Sumber Daya Air

Isu strategis: Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya air, serta adanya ancaman krisis air bersih di sejumlah kawasan di DIY

Sejumlah kawasan di DIY, baik di perkotaan maupun pedesaan, berpotensi mengalami krisis air bersih. Penyebabnya bervariasi, seperti berkurangnya daerah resapan air akibat bencana alam maupun pertumbuhan permukiman, luapan air sungai, cemaran lumpur sungai, tertutup material vulkanik, pengelolaan septic tank yang tidak sehat, dan sebagainya. Krisis air bersih tidak selalu dapat dikenali dengan mudah karena tidak selalu berupa terbatasnya volume air di musim kemarau sebagaimana yang terjadi pada sejumlah lokasi di Gunung Kidul dan Bantul, atau perubahan warna dan adanya bau tidak sedap seperti yang terjadi di beberapa lokasi yang terkena dampak bencana Merapi di Sleman atau luapan sungai di Bantul. Krisis air juga dapat berupa buruknya kualitas air yang tersedia, seperti yang dialami oleh masyarakat Kota Yogyakarta karena sumurnya tercemar bakteri coli ataupun limbah nitrat. Krisis air seperti ini lebih berbahaya karena tidak tampak dan dampaknya sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pemetaan kawasan yang berpotensi mengalami krisis air bersih beserta faktor penyebabnya perlu dilakukan sehingga bentuk antisipasi dan penanggulangan untuk setiap kawasan dapat

dirumuskan dengan baik. Peta ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen penyadaran masyarakat untuk lebih peduli dan berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih pada sejumlah kawasan di DIY.

Visi, Misi dan Sasaran

Biro Administrasi Pembangunan perlu mereformulasi visi kelembagaan yang dapat menunjukkan peran, kontribusi dan sekaligus target besar yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Visi yang direkomendasikan untuk Biro Administrasi Pembangunan 2013-2017 yaitu “Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang terarah, sistematis, dan terpadu dalam mencapai DIY yang Maju, Berkarakter dan Berbudaya”. Biro Administrasi Pembangunan bertanggungjawab dalam pengembangan kebijakan, yaitu mulai dari penyiapan bahan (formulasi) kebijakan, koordinasi penyelenggaraan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Karena itu terwujudnya kebijakan pembangunan yang berkualitas, yaitu yang terarah, sistematis dan terpadu, merupakan bentuk kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam pencapaian visi pembangunan DIY 2013-2017.

Terarah yang dimaksudkan di sini adalah kejelasan dari orientasi atau tujuan dari setiap kebijakan yang dikembangkan. Sistematis mengandung maksud adanya tahapan atau road map yang runtut dan logis dari proses pengembangan kebijakan maupun target-target substantif yang akan dicapai. Sedangkan terpadu maksudnya adalah adanya keterkaitan, integrasi, dan eliminasi fragmentasi (tidak parsial) dalam pengembangan kebijakan-kebijakan yang relevan. Sebagaimana disebutkan di bagian depan, semua kebijakan yang dikembangkan oleh Biro Administrasi Pembangunan ditujukan semata-mata untuk berkontribusi dalam mewujudkan DIY yang Maju, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi yang direkomendasikan untuk Biro Administrasi Pembangunan, yaitu strategi besar untuk mewujudkan visi, terdapat tiga:

- (1) Menyelenggarakan kajian yang sistematis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral, kebudayaan dan pariwisata, dekonsentrasi dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

- (2) Mengkoordinasi penyelenggaraan kebijakan pembangunan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral, kebudayaan dan pariwisata, dekonsentrasi dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- (3) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan pembangunan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral, kebudayaan dan pariwisata, dekonsentrasi dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Menurut ketentuan Permen nomor 54 Tahun 2010, komponen yang harus dirumuskan sebagai turunan dari misi adalah tujuan. Namun untuk memadatkan planning paper ini maka berikut ini langsung dirumuskan sejumlah sasaran, yaitu sebuah kondisi yang ditetapkan untuk diwujudkan paling lambat pada 2017. Sasaran-sasaran berikut ini ditetapkan berdasarkan identifikasi isu strategis. Karena rumusan isu strategis lebih didasarkan pada justifikasi dari sejumlah alternatif permasalahan yang terdapat pada RPJMD maka rumusan sasaran berikut ini masih perlu dicermati secara kritis untuk disesuaikan dan dipertajam.

Terdapat 10 sasaran yang diusulkan untuk ditetapkan, yaitu:

1. Menguatnya peran sekolah dalam membentuk karakter dan kepedulian siswa dalam pelestarian dan pengembangan budaya
2. Menguatnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang memiliki concern dengan pelestarian dan pengembangan budaya
3. Meningkatnya soliditas jejaring kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
4. Tersedianya rancangan pengembangan sistem jaringan dan sarana transportasi umum yang terpadu antarmoda dan antarwilayah serta yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi
5. Terlembaganya tradisi pengembangan penelitian sebagai basis pengembangan kebijakan
6. Terbangunnya sistem pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih.
7. Tersedianya grand design dan road map pengembangan dan penggunaan teknologi baru rumah tangga, transportasi, dan perkantoran yang menggunakan energi alternatif terbarukan berbasis sumberdaya lokal

8. Terselenggaranya audit penggunaan energi
9. Terselenggaranya pembangunan dan pemanfaatan ruang yang secara konsisten memperhatikan desain tata ruang
10. Terselenggaranya audit pengembangan kawasan permukiman terpadu

Strategi dan Program Prioritas

Secara umum strategi yang dikembangkan untuk mencapai setiap sasaran adalah sebagai berikut:

- (1) Menerapkan prinsip *evidence-based policy* pada setiap program yang dikembangkan, yaitu perumusan setiap program untuk merespon isu atau mencapai sasaran yang spesifik selalu didahului dan didasarkan pada hasil kajian sehingga sangat kontekstual dan relevan.
- (2) Task force atau tim kerja akan dibentuk untuk melakukan koordinasi dengan SKPD teknis dan yang relevan dengan pelaksanaan setiap program yang direkomendasikan ataupun yang dirancang oleh Biro sebagai program pemerintah DIY. Selain itu, task force juga akan melakukan monitoring dan evaluasi. Task force beranggotakan aktor kebijakan dari Biro, SKPD terkait dan bisa melibatkan pihak eksternal seperti akademisi, peneliti, dan tokoh masyarakat.
- (3) Monitoring senantiasa akan dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan program sehingga sesuai dengan desain program. Monitoring akan dilakukan untuk mendeteksi sejumlah kelemahan dan sekaligus membenahinya sehingga program dapat lebih efektif mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (4) Evaluasi akan diselenggarakan untuk mengetahui efektivitas program dan juga menjadi basis pemberian rekomendasi bagi pengembangan program pada periode yang selanjutnya.

Program prioritas adalah program utama yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Tentu di luar program prioritas dapat dikembangkan berbagai program lainnya yang bersifat mendukung program prioritas ataupun untuk mencapai tujuan-tujuan lain di luar sasaran yang telah ditetapkan namun penting untuk

dilakukan, misalnya program untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, program-program yang bersifat rutin, atau program untuk merespon dinamika isu terbaru.

Tabel berikut ini memaparkan program-program prioritas yang direkomendasikan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditawarkan di depan.

Tabel 2
Sasaran dan Program Prioritas

Sasaran	Program Prioritas				
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1. Menguatnya peran sekolah dalam membentuk karakter dan kepedulian siswa dalam pelestarian dan pengembangan budaya	Evaluasi peran sekolah dan efektivitasnya (identifikasi good and bad practices)	Kajian untuk perumusan rekomendasi kebijakan (model-model strategi pembentukan karakter dan kepedulian terhadap budaya)	Koordinasi dan monev dalam penerapan strategi	Koordinasi dan monev dalam penerapan strategi	Koordinasi dan monev dalam penerapan strategi
2. Menguatnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang memiliki concern dengan pelestarian dan pengembangan budaya	Kajian pemetaan stakeholders dan mitra dalam pelestarian dan pengembangan budaya	Kajian untuk memformulasikan model-model kerjasama dalam pelestarian dan pengembangan budaya	Koordinasi dan monev dalam penyelenggaraan kerjasama	Koordinasi dan monev dalam penyelenggaraan kerjasama	Koordinasi dan monev dalam penyelenggaraan kerjasama
3. Meningkatnya soliditas jejaring kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Kajian untuk mengidentifikasi nilai manfaat dan kendala dalam kerjasama	Kajian untuk pengembangan model-model kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata DIY	Koordinasi dan monev penyelenggaraan kerjasama dalam pengembangan pariwisata	Koordinasi dan monev penyelenggaraan kerjasama dalam pengembangan pariwisata	Koordinasi dan monev penyelenggaraan kerjasama dalam pengembangan pariwisata

4. Tersedianya grand design dan road map pengembangan sistem jaringan dan sarana transportasi umum yang terpadu antarmoda dan antarwilayah serta yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi	Evaluasi komprehensif kinerja sistem jaringan dan sarana transportasi umum di DIY	Kajian pemetaan kebutuhan transportasi serta kemauan warga untuk membayar	Kajian pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu dengan sarana transportasi yang telah ada, baik yang berbasis rel maupun jalan	Kajian pengembangan sistem pendukung berupa insentif penggunaan angkutan umum dan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi (integrated ticket, park and ride system, fasilitas pedestrian, dan road pricing)	Formulasi grand design dan road map pengembangan sistem jaringan dan sarana transportasi umum yang terpadu antarmoda dan antarwilayah serta yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi
5. Terlembaganya tradisi pengembangan penelitian sebagai basis pengembangan kebijakan	Evaluasi kinerja sistem dan proses pengembangan kebijakan pemerintah di DIY	Kajian untuk membangun sistem pengembangan kebijakan yang lebih efektif	Koordinasi dan monev peningkatan kapasitas aktor kebijakan	Koodinasi dan monev penerapan sistem pengembangan kebijakan yang baru	Koodinasi dan monev penerapan sistem pengembangan kebijakan yang baru
6. Terbangunnya sistem pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih	Kajian pemetaan kawasan berpotensi krisis air bersih beserta faktor penyebabnya	Kajian untuk memberikan rekomendasi tentang sistem pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih	Koordinasi dan monev penerapan sistem pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih	Koordinasi dan monev penerapan sistem pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih	Koordinasi dan monev penerapan sistem pencegahan dan penanggulangan krisis air bersih
7. Tersedianya grand design dan road map pengembangan dan penggunaan teknologi baru rumah tangga, transportasi, dan perkantoran yang menggunakan energi alternatif terbarukan berbasis sumberdaya lokal	Kajian identifikasi teknologi baru rumah tangga, transportasi, dan perkantoran yang menggunakan energi alternatif terbarukan (yang telah dikembangkan institusi semacam BPPT ataupun lembaga nonpemerintah	Kajian eksplorasi teknologi baru rumah tangga, transportasi, dan perkantoran yang menggunakan energi alternatif terbarukan berbasis sumberdaya lokal (bisa melalui skema sayembara terbuka ataupun kerjasama dengan perguruan tinggi)	Koordinasi penyelenggaraan uji coba teknologi baru di lingkungan pemerintah dan masyarakat DIY	Koordinasi penyelenggaraan uji coba teknologi baru di lingkungan pemerintah dan masyarakat DIY	Penyusunan grand design dan road map pengembangan dan penggunaan teknologi baru rumah tangga, transportasi, dan perkantoran yang menggunakan energi alternatif terbarukan berbasis sumberdaya lokal

8. Terselenggaranya audit penggunaan energi	Evaluasi penggunaan energi (listrik dan BBM) di lingkungan kantor pemda	Evaluasi penggunaan energi (listrik dan BBM) di fasilitas publik (sekolah, puskesmas, RS, angkutan umum, perpustakaan, dll)	Kajian untuk merekomendasikan sistem audit penggunaan energi di lingkungan pemda dan fasilitas publik	Koordinasi dan monev penerapan sistem audit penggunaan energi di lingkungan pemda dan fasilitas publik	Koordinasi dan monev penerapan sistem audit penggunaan energi di lingkungan pemda dan fasilitas publik
9. Terselenggaranya pembangunan dan pemanfaatan ruang yang secara konsisten memperhatikan desain tata ruang	Koordinasi dan monev pemanfaatan ruang	Koordinasi dan monev pemanfaatan ruang	Koordinasi dan monev pemanfaatan ruang	Koordinasi dan monev pemanfaatan ruang	Koordinasi dan monev pemanfaatan ruang
10. Terselenggaranya audit pengembangan kawasan permukiman terpadu	Evaluasi praktik pengembangan permukiman di DIY	Kajian untuk merekomendasikan sistem audit pengembangan kawasan terpadu	Koordinasi dan monev pengembangan kawasan permukiman terpadu	Koordinasi dan monev pengembangan kawasan permukiman terpadu	Koordinasi dan monev pengembangan kawasan permukiman terpadu